

Kota Sabang terdiri dari beberapa pulau, di antaranya yang terbesar Pulau Weh. Pulau ini diapit oleh beberapa pulau kecil; yaitu, Pulau Klah, Pulau Seulako, Pulau Rubiah dan Pulau Rondo. Ibukota Kota Sabang berada di Pulau Weh. Kota Sabang sangat terkenal dengan destinasi pariwisata laut dan ikon Tugu Kilometer Nol Indonesia. Tapi, tak semua orang tahu bahwa kota ini juga memiliki sangat banyak benteng dan bangunan bersejarah masa kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang. Tidak salah juga Kota Sabang dapat dijuluki "Kota Benteng", khususnya benteng-benteng tinggalan perang Asia Timur Raya dalam rangka Perang Dunia II.

Perang Dunia II melibatkan Jepang (bersekutu dengan Italia, Thailand, dll.) *vis a vis* Amerika Serikat (bersekutu dengan Inggris, Cina, Prancis, dll.). Pada awalnya Jepang unggul dalam perang ini ketika mereka berhasil membombardir pangkalan A.L. Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941.

Jepang berhasil menguasai Asia Timur Raya dan menempatkan militer serta memperkuat pemerintahan lokal dan membuat sistem pertahanan dengan membangun banyak benteng pertahanan.

Pasukan militer Jepang mendarat di Kota Sabang pada tanggal 12 Maret 1942 dari Pulau Pinang di Selat Malaka. Pendudukan Jepang untuk memperkuat sistem pertahanannya di Aceh. Pada awalnya mereka mengampanyekan; Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia.

Penguasa militer Jepang di Aceh S. Masubuchi tiba di Kutaraja (Kota Banda Aceh) pada tanggal 15 Maret 1942 via Kota Medan, Sumatera Utara. Beberapa lama berkuasa, ia digantikan oleh S. Sagawa. Selanjutnya, dipimpin S. Yamamoto hingga kekalahan Jepang kepada Sekutu, pada tanggal 14 Agustus 1945.

Sejak menguasai Aceh, Jepang melanjutkan sistem pemerintahan Residen, yang dinamakan *Aceh Syu Tyo Kan*. *Aceh Syu Tyo Kan* dipimpin oleh Shazaburo Iino. Pemerintahan ini berakhir hingga pendudukan mereka juga harus berakhir di Aceh.

Setelah Prefektur Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Sekutu dan Prefektur Nagasaki juga

dibom pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat, maka perlawanan Jepang berakhir sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia II.

Gejala kekalahan Jepang sebenarnya sudah tampak sejak mereka gencar mengumpulkan bahan makanan di wilayah-wilayah pendudukannya di Asia Timur Raya. Pada saat itu, mereka juga sangat giat membangun sistem pertahanan di wilayah pendudukannya untuk perlindungan dari serangan Sekutu.

Untuk tujuan tersebut Jepang memberlakukan *romusha* (gotong-royong secara kerja paksa). Salah satu aktivitas *romusha* di Kota Sabang adalah membangun banyak benteng untuk memperkuat pertahanan garis pantai, di antaranya Kompleks Benteng Anoi Itam.



Kompleks Benteng Anoi Itam berada di Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pembangunan Benteng Anoi Itam bertujuan untuk menangkal serangan Sekutu dari arah Samudera Hindia (Laut Andaman) dan Selat Malaka.

Lokasi benteng ini berada di semenanjung berbukit kapur yang bertebing curam yang dinamakan Ujong Meutigo. Di sisi utara, terdapat teluk dan tanjung yang bernama Batee Dua dan Ujong Teutek. Di sisi selatan teluk terdapat tanjung yang bernama Ujong Seurindang. Benteng-benteng ini mengikuti tebing terjal tanjung dan bukit karang.



Tanjung dan bukit karang diapit dua teluk yaitu di sisi utara Mata Ie, dan di sisi selatan Seurindang. Di Seurindang juga masih ada lagi benteng-benteng.

Benteng Anoi Itam berdasarkan tinggalan memiliki 10 (sepuluh) struktur bangunan yang terdiri dari benteng, dan bangunan sarana pendukung pertahanan militer berbentuk benteng. Lima struktur benteng, berupa tapak *alutsista*, yaitu lokasi penempatan senjata, baik senjata ringan maupun berat. Empat struktur lainnya adalah sarana pendukung sistem pertahanan. Tapi, masih ada sebuah struktur yang belum diketahui fungsinya, karena telah mengalami kerusakan fisik.

Gugusan benteng di Kompleks Anoi Itam berukuran kecil-kecil yang membentuk garis dalam sistem pertahanan garis pantai, baik di sisi selatan maupun utara. Pembangunannya dilakukan oleh *romusha*, yang menjadi kewajiban setiap *Syu-tyo* dan *Syu-ki* (pemimpin di daerah masing-masing) untuk menyediakan tenaga orang untuk bergotong-royong dengan waktu kerja 8 jam/hari. Baru pada tanggal 30 Agustus 1943, jam kerja *romusha* di Aceh diturunkan menjadi 6 jam/hari. Kewajiban *romusha* tak boleh berhenti, meskipun bulan